

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN IZIN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (Studi Kasus Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang)



AMRIATI DJALIL

B11112055

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN IZIN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
(Studi Kasus Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang)**

OLEH:

AMRIATI DJALIL

B11112055

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Hukum Dalam Bagian Hukum Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG
DALAM PERIZINAN TERKAIT PEMBANGUNAN PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA AIR**

Disusun dan diajukan oleh:


**AMRIATI DJALIL
NIM B111 12 055**

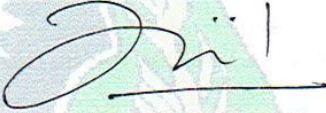
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 02 Maret 2016 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004


Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMRIATI DJALIL

No. Pokok : B 111 12 055

Program : ILMU HUKUM

Bagian : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Judul Skripsi : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
ENREKANG TERKAID PEMBERIAN IZIN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
AIR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi.

Makassar, Februari 2016

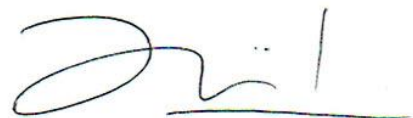
Pembimbing I



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H

NIP. 19570430 198503 1 004

Pembimbing II



Ariani Arifin, S.H., M.H

NIP. 19830605 200604 2 003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **AMRIATI DJALIL**

Nomor Pokok : **B 111 12 055**

Program : **ILMU HUKUM**

Bagian : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN IZIN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
(Studi Kasus Daerah Aliran Sungai di Kabupaten
Enrekang)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Februari 2016

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

AMRIATI DJALIL (B11112055), TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN IZIN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (Studi Kasus Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang), dibawah bimbingan **MARTHEN ARIE** (selaku pembimbing 1) dan **ARIANI ARIFIN** (Selaku pembimbing 2).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah dalam memberikan izin terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui apakah pemberian izin pemerintah daerah terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan aturan.

Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Enrekang pada instansi Kantor Bupati, Kantor Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik wawancara dan pengkajian terhadap data-data, buku-buku, dan dokumen-dokumen. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) kewenangan pemberian izin Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan (II) Dasar Hukum Pemberian Izin Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Terhadap Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang, yaitu Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan, namun secara khusus untuk daerah Kabupaten Enrekang masih belum terdapat aturan dasar yang mengikat dari pemberian izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan akibatnya adanya ketimpangan aturan yang digunakan.

ABSTRACT

AMRIATI DJALIL (B11112055), GIVING PERMISSION TO LEGAL REVIEW ON DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT POWER (Case Study Watershed in Enrekang), under the guidance Marthen ARIE (as a mentor 1) and Ariani ARIFIN (As a supervisor 2).

This study aimed to implementation of the authority of Local Government in giving consent to the construction of Litrik Hydro at Watershed in Enrekang and to determine whether the granting of local governments on the development of hydroelectric plants in Watershed in Enrekang in accordance with the rules ,

The research was carried on in Enrekang the agency Regent Office, Investment Office and the One Stop service, Forestry, Mining and Energy Department and the Law Faculty of Hasanuddin University library. For that purpose mencapai authors conducted field research and library research (library research) by interview and assessment of the data, books, and documents. Furthermore, the data were analyzed using qualitative analysis methods are then presented descriptively explain, describe and illustrate in accordance with the problems closely related to this research.

The results of this study indicate that: (i) the licensing authority of local government Enrekang the Development of Hydroelectric Power Plant is still based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Government. And (II) of the Basic Law Granting Local Government Enrekang Against the Development of Electric Power Water in Watershed in Enrekang, namely Law 30 of 2009 on Labour listrikan, but specifically for the area Enrekang still contained basic rules binding of granting permission hydroelectric development, and consequently the existence of inequality rules are used.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya, tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para Sahabatnya dan suri tauladannya sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN IZIN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR(Studi Kasus Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang)”**.

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Administrasi Negara program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Haanuddin.

Sembah sujud dan hormat, penulis haturkan kepada Ayah handa Djalil dan Ibu Hasnah Idang yang telah mencurahkan sayang, perhatian, pengorbanan, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kepada saudara-saudaraku AmrullahDjalil, Amril Djalil, Amaliah Djalil, Amsyarullah Djalil dan seluruh keluarga besarku yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karna itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unhas, Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unhas, dan Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas.
3. Prof. Dr. Marthen Arie,S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dan Ariani Arifin, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik bagi penulis.
4. Prof. Dr. Abdul Razak,S.H.,M.H, Ruslan Hambali, S.H.,M.H, dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H. selaku tim penguji penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas.

6. Bapak Prof.Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.Hselaku Penasehat Akademik atas waktu dan nasehat yang diucapkan kepada penulis.
7. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Staf Kantor Bupati, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Enrekang dan Perpustakaan Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan selama penelitian penulis.
9. Sahabat-shabatku di Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unhas (UKM LP2KI FH-UH), terutama Riskayanti, Sri wahyuni S, Arif Rachman Nur, Nur Indah Damai Lestari, Cindra, Zulkifli Rahman, Ridwan Anugrah Mantu, Siti Syahrani Nasiru, Nur halide Zainal, serta seluruh kawan-kawan, senior dan junior yang tidak bias ku sebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabatku di UKM PERBAKIN Unhas, terutama Nisa, Rasda, Nuzul, Keyzia, Agung, Nuge, Yunus, Indah Iac, Aulia, Dandi, Afri, Yayan, Iyana, Ardi, Eky, Yandju, Yayat, Rezky, Edy,

Dian, Juni, Indah, Dayat, Nuge, Resky, Alling, serta semua senior yang tidak bias saya sebutkan persatu.

11. Sahabat-sahabat penulis, Dina Yunita Sari, Sulbyah Reski, Sriwahyuni Tajuddin, sulastri, Marissa Rahmadania Yahya, Fathul Muhammad, Wahyudi, dan Iswan Amiruddin yang selama ini menemani dan memberikan kenangan-kenangan manis selama bangku perkuliahan bersama penulis dan juga untuk bisa berjuang bersama-sama hingga sampai pada tahap ini.

12. Teman-teman Alumni 2012 SMA N 1 Alla Uci, Ayu, Dina, Pitti, Azaisa, Putri, Ade, Ugga, Iccang, Awan, Jeppy, Fikri, Erwin, Anni serta semua kawan-kawan yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu

13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus PETITUM 2012.

14. Teman-teman seperjuangan ku pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Kanda Haidir, Kanda Rusli, Ayu, Pubi, Wana serta semua kawan-kawan se Kecamatan Gantarang.

15. Kawan-kawan seluruh UKM yang tidak dapat disebut semua.

16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karna itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Makassar, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAU PUSTAKA

A. Perizinan	13
1. Pengertian Izin	13
2. Unsur-Unsur Perizinan.....	16
3. Sifat Izin	20
4. Fungsi Perizinan	22
5. Tujuan Perizinan.....	24
6. Format dan Substansi Perizinan	26
B. Pemerintah Daerah (Pemda)	29
1. Pengertian Pemerintah Daerah	32
2. Wewenang Pemerintah Daerah Terkait Pemberian Izin	33
3. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda).....	35
4. Pengertian Daerah Otonomi	39
C. Pembangunan.....	42
1. Pengertian Pembangunan	42
2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Izin Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang.....	53
B. Dasar Hukum Pemberian Izin Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak berdirinya telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (*rechtstaats*). Sebagai negara berdasarkan hukum, negara dan pemerintah Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Serta memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur, merata baik materiil dan spiritual.¹ Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 dimana Negara Indonesia berdasarkan negara Hukum. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebebasan tertentu untuk secara aktif bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai masalah yang membutuhkan penanganan secara cepat.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang mengiringi modernisasi mengantarkan negara pada suatu perubahan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dan dapat dirasakan dari pembangunan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan sarana maupun prasarana dan infrastruktur yang kian canggih dan inovatif.

¹ Alinea ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.

Pembangunan merupakan salah satu upaya dari setiap pemerintahan daerah untuk menuju negara yang maju. Dipandang dari sudut substansi hukum yang menjadi payung hukum pelaksanaan pengelolaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam daerah saat ini telah memberikan norma hukum yang cukup baik, didalam memberikan pedoman bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pembangunan, agar pada akhirnya pembangunan dalam hal pengelolaan sumber daya alam benar-benar diusahakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat hal ini sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, isi ayat pasal ini bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termaksud didalamnya beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia. Norma hukum tersebut meliputi norma hukum tata negara, norma hukum administrasi dan bahkan masih diperkuat dengan adanya norma hukum pidana (administrasi), dimana ketiganya sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana desentralisasi.

Dewasa ini administrasi publik mengalami tantangan yang cukup pelik, sebagai akibat dari tuntutan masyarakat yang semakin beragam akan pelayanan publik, sementara itu pelayanan publik sudah sangat

terbatas dilihat dari pembagunan yang sangat pesat namun banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik dalam jumlah maupun kualitas. Oleh karena itu administrasi publik dituntut untuk mampu menjawab berbagai tantangan persoalan-persoalan pelayan publik yang ada dengan menempuh beragam cara.

Salah satu caranya yang dapat ditempuh guna menjawab tantangan itu adalah dengan melakukan reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik dilakukan dengan berbagai aspek yang melingkupinya. Salah satu yang paling penting diperhatikan dalam proses reformasi administrasi publik adalah aspek pelayanan kepada masyarakat atau dikenal sebagai pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah karena pemenuhannya diperlukan untuk pewujudan dan perkembangan kesalingtergantungan sosial, dan pada hakekatnya, perwujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuasaan pemerintah. Pelayanan publik dapat dimengerti sebagai pengambilalihan tanggung jawab oleh kolektivitas atas sejumlah kekayaan, kegiatan atau pelayanan yang harus lepas dari logika kepemimpinan pribadi atau swasta dan harus dihindarkan dari tujuan melalui mencapai keuntungan. Pelayanan publik mempunyai berbagai bentuk organisasi hukum, baik didalam maupun diluar sektor hukum.²

² Haryatmoko, 2007, *Etika Komunikasi*, Yogyakarta, Kanisius (Anggota IKAPI), hal. 73.

Pelayanan publik yang diupayakan oleh pemerintah saat ini diharapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia/aparatur belum memadai. Hal ini terkait dengan masalah banyaknya keluhan dan aduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga telah diupayakan oleh pihak swasta.

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibanding dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan/atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan tersebut. Reformasi pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna.

Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelat-belit ketika harus mengurus suatu perizinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dimana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Disamping itu terdapat kecendrungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki “uang”, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antara yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Saat ini, Indonesia menempati peringkat 161 di dunia dalam penelitian kemudahan berbisnis. Adapun dalam penelitian memulai usaha, Indonesia menempati peringkat 122.³ Peringkat ini mempunyai dampak pada daya tarik bagi calon investor luar negeri untuk melakukan penilaian berinvestasi. Jika pelaksanaan tuju belas hari masa kerja untuk

³www.aparaturnegara.go.id. Diakses pada 3 oktober 2015, 2/10/2015, 15:40

pengurusan izin usaha baru berjalan dengan baik, pemerintah akan mempercepat pengurusan menjadi sepuluh hari. Target tersebut memungkinkan Indonesia mencapai peringkat lima puluh dari jumlah 183 paling cepat dalam pengurusan izin membuka usaha. Baru-baru ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Paket Kebijakan Jilid II, beberapa kebijakan tersebut diantaranya layanan penyusunan izin investasi tiga jam, pengurusan insentif pengurangan dan pembebasan pajak lebih cepat.

Pemerintah tidak memungut pajak pertambahan nilai alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, pengurangan pajak bunga deposito, serta perampingan izin di sektor kehutanan. Pemerintah akan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin prinsip, akta perusahaan, dan No. pokok wajib pajak. Untuk mencapai target tersebut, Badan koordinasi Penanaman Modal akan menyiapkan notaries di pelayanan terpadu satu pintu (PTSUP) pusat. Tapi kemudahan tersebut merupakan insentif bagi investor yang mengelontarkan modal sedikitnya Rp. 100 miliar atau memperkerjakan 1.000 tenaga kerja Indonesia.⁴

Dalam kenyataannya, dari 524 Kabupaten/Kota, yang telah menerapkan sistem satu atap secara manual tercatat 299 Kabupaten dan Kota. Setelah penerapan itu berlaku, jumlah kabupaten dan kota yang menerapkan sistem layanan cepat akan bertambah menjadi 314

⁴ Tempo online, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/01/087705359/paket-kebijakan-jilid-ii-urus-izin-investasi-cukup-tiga-jam>, Diakses pada 22/10/2015, pukul 21:32.

Kabupaten/Kota. Pada akhirnya, diharapkan seluruh daerah sudah menerapkan layanan secara elektronik.

Peningkatan pelayanan perizinan investasi kepada para investor baik baru maupun investor yang ingin memperpanjang izin usahanya sangat diperlukan. Pemberian perizinan yang cepat kepada para investor akan menjunjung kinerja perizinan yang nantinya akan mempercepat peningkatan penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan salah satunya pada pengembangan SDE sebagai terbaharukan. Energi pada tahun ini memperoleh peningkatan dibandingkan tahun-tahun lalu. Kemajuan dibidang investasi sekarang dilirik pada bidang pengembangan sumber daya Energi Terbaharukan, contohnya pada perusahaan PT.X Energi yang melakukan investasi di Indonesia dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Saat ini pengembangan Energi Baru Terbaharukan (EBT) mengacu kepada Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan pemberian izin dari ketenaga listrikan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenaga Listrikan. Pemberian izin untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)diberikan wewenang kepada Kabupaten/Kota, diatur di dalam Pasal 21 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, namun setelah diubahnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemberian izin yang tadinya diberikan pada daerah Kabupaten/Kota sekarang diberikan kepada daerah Provinsi dan diatur juga pada Peraturan Daerah yang menyangkut masalah penerbitan izin.

Disebutkan kontribusi EBT dalam pembaharuan energi primer nasional pada Tahun 2015 adalah sebesar 17 persen dengan komposisi bahan bakar nabati sebesar 5 persen, panas bumi 5 persen, serta biomas, nuklir, air, surya, dan angin 5 persen, kemudian batu bara yang dicairkan sebesar 2 persen. Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil pemerintah adalah menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Mikro Hidro menjadi 2,846 MW pada Tahun 2025, kapasitas terpasang Biomasa 180 MW pada tahun 2020, kapasitas terpasang angin (PLT Bayu) sebesar 0,97 GW pada Tahun 2025, surya 0,87 GW pada tahun 2024, dan nuklir 4,2 GW pada Tahun 2024. Total investasi yang diserap dalam pengembangan EBT (*Renewable Energy*) sampai Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 13,197 USD.⁵ Maka dari itu, di Tahun 2015 adalah waktu yang terbaik bagi para investor, untuk segera, menanamkan modal pada bidang Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).

Peningkatan investasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam mendukung perekonomian. Untuk itu pelayanan perizinan bagi para investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Karena tidak dipungkiri banyaknya

⁵<https://adienergy.wordpress.com/2015/06/07/saat-terbaik-investasi-di-pembangkit-listrik-tenaga-minihidro-pltm/> , 3/10/2015, pukul 14:30.

pelanggaran-pelanggaran pada penerbitan perizinan oleh pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, contohnya seperti pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan, Bandung, Jawa Barat, berkapasitas 4 x 230 MW illegal. Pembangunan *access road* (jalan hantar) PLTA Cisokan sepanjang 27,3 kilometer sejak Januari 2013 hanya didasarkan pada izin prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

Padahal disebagian lokasi peroyek jalan, PLN diwajibkan memiliki izin pinjam pakai lahan, berdasarkan Permenhut Nomor: P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. PLN dinilai telah mengubah bentangan alam dan merusak kawasan hutan. PLN telah melakukan tindak pidana kejahatan kehutanan seperti tertuang dalam Pasal 50 dan 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Dari data yang dikumpulkan JNIB, izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan sampai Maret 2014, PT PLN tidak terdaftar sebagai pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Upper Cisokan.

Masalah lainnya adalah pembebasan lahan untuk kepentingan umum dengan mendasarkan pada pasal 37 Undang-Undang Nomor.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembagian untuk kepentingan Umum.

Dalam aturan ini, penyelesaian pembebasan lahan diberi waktu paling lama dua tahun.

Hingga kini Tim P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) belum menyelesaikan pembebasan lahan karena beberapa hal. Di antaranya soal kesepakatan harga dan luas areal tanah warga yang akan memperoleh penggantian, belum ada akta kesepakatan antara PLN dan warga terkena dampak (WTD) yang disahkan oleh BPN setempat. Kinerja yang dilakukan Tim P2T dalam hal pembebasan tanah tidak profesional. “Sosialisasi yang dilakukan tidak merata ke semua warga terkena dampak yang masuk dalam pemetaan lokasi pembangunan PLTA. Akan dilakukan pemindahan dan permukiman kembali warga yang desanya akan ditenggelamkan untuk pembangunan Upper Dam dan Lower Dam. Selain itu, sosialisasi Tim P2T mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan dan pelatihan pra dan pascapemukiman warga. Salah satu warga yang menjadi korban, Juddin, mengatakan, pengukuran tanah yang dilakukan P2T tidak pernah mengkonfirmasi luas lahan masyarakat yang diukur. Misalnya, luas lahan miliknya 900 m², tapi oleh tim P2T ditentukan sepihak menjadi 400 m².⁶

Melihat permasalahan yang sangat kongkrit diatas dimana pemberian izin yang masih tidak dengan prosedur yang benar sesuai dengan undang-undang yang dilakukan Pemerintah Daerah dan kemudahan perusahaan asing melakukan pembangunan di Indonesia

⁶ Tempo. Co Bisnis,
<http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/12/07/090725550/pembangunan-plta-upper-cisokan-dinilai-ilegal-ini-alasannya>, diakses pada pukul 18.17.

tidak dengan prosedur yang ada maka hal ini yang mendasari penulis mengangkat judul skripsi mengenai **“Tinjauan Pemberian Izin Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah dalam memberikan izin terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang ?
2. Apakah pemberian izin pemerintah daerah terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan aturan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah dalam memberikan izin terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian izin pemerintah daerah terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan aturan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui serta membuktikan teori-teori yang berkenaan dengan penulisan ini.
2. Sebagai salah satu studi yang diharapkan dapat menjadikan bahan rujukan/referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan materi dan skripsi ini, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap isu-isu pemberian perizinan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Istilah perizinan berasal dari kata dasar izin atau “*licere*” dalam bahasa latin.⁷ Dengan kata lain, kata “perizinan” dengan mendapatkan imbuhan “per-an”.. Perizinan merupakan bentuk jamak dari kata izin yang oleh W.J.S. Poerwarminta, diartikan sebagai “perkenaan atau pernyataan mengabulkan tiada melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu”.⁸ .Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Izin itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang), atau persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan, atau persetujuan membolehkan.⁹ Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara.¹⁰ Selain penting

⁷ Bryan A. Garner (ed), 1999, *Blac’s Law Dictionary*, USA,Seventh Edition, PT. PAUL, MINN, hlm. 932.

⁸ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Malang, Sentara Perss, hlm. 86.

⁹ Pusat Bahasa Sepdikbud, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 447.

¹⁰ Philipus M. hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridiko, hal. 12.

bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara mendapat pengetahuan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum.

Mr. N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J. ten Brege, membagi perizinan dalam arti luas dan dalam arti sempit, yaitu sebagai berikut :

“ Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasannya. Ini adalah paparan luas mengenai pengertian izin. Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasan-batasan tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya member perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).”¹¹

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dn dan ten Brege, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya kemungkinan untuk seorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengandemikian, mengikatkan

¹¹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 200.

perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut berbeda dengan pandangan Van der Pot. Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan diakukanya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “Dilarang tanpa izin...(melakukan)...dan seterusnya”. Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.¹²

Pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan buki legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin

¹² Sri Prudyatmoko, 2009, *Perizinan Program dan Upaya Pembangunan*, Jakarta, Grasindo, hlm. 7

tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen yang dibuat sebagai izin tidak termaksud yang diberikan secara lisan.

2. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan pengertian yang diuraikan oleh M.W Van Praag , dapat diraikan beberapa unsur dari perizinan, yaitu :

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap diperhatikan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan kongkret yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu wujud dari keputusan ini adalah izin. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang bersifat kongkret. Sebagai keputusan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.¹³

¹³ Ridwan HR, *op.ci.t*, hlm. 202.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin, yang mana secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapan, menurut Markus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang tersebut bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan

atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang.

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan;
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi- kondisi tersebut;
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan izin.¹⁴

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan unsur pemerintahan baik di tingkatpusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termaksud instansinya) pemberian izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

¹⁴*Ibid*, hlm. 203-204

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.M. ten Berge, keputusan memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi Negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.¹⁵

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa kongkrit ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan

¹⁵*Ibid*, hlm. 204

persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam pemberian izin itu bersifat kongkret konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan kongkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbitrer* (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut, dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.¹⁶

3. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan Tata Usaha Negara (TUN) yang berwenang, yang isi substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan

¹⁶*Ibid*, hlm. 207-208

- hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin;
- b. Izin bersifat terkait, adalah izin sebagai keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin pemberian kebebasan dan wewenang tergantung pada sejauhmana peraturan perundang-undanganmengaturinya.
 - c. Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang memberikeuntungan kepada yang bersangkutan atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut;
 - d. Izin yang bersifat memberatkan, menurut izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya;
 - e. Izin yang bersifat berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek;
 - f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama;
 - g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya atau kualitas pribadi dan pemohon izin; dan

- h. Izin bersifat kebendaan, merupakan izin yang sifatnya tergantung pada sifatnya dan objek izin.

Perbedaan antara izin yang bersifat pribadi dan izin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain. Izin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya terdapat penjualan perusahaan pada pihak lain, maka izin secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan (nama PT) tidak berubah. Izin seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.

4. Fungsi Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penerbit dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penerbita, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat lainnya tidak bergantung satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Apabila dikatakan bahwa izin dapat difungsikan sebagai instrument pengendalian dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi

Atmosudirdjo,¹⁷ bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi diantaranya :

a. Instrumen rekayasa pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan yang memberikan inisiatif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat juga menjadi penghambat (sekali-gus sumber korupsi) bagi pembangunan.

Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditetapkan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber *income* daerah, maka hal ini tentu akan memberikan dampak negatif (*disinsentif*) bagi pembangunan.

b. *Budgetering*

Perizinan memiliki fungsi keuangan (*budgetering*) yaitu menjadi sumber pendapatan negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa

¹⁷ Prajudi Admosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 98

retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

c. *Reguleren*

Perizinan memiliki fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengatur tindakan dan perilaku masyarakat sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh pemerintah sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan harus dapat terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut.

5. Tujuan Perizinan

Tujuan dan fungsi pemberian izin adalah untuk pengendalian dari pada sktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinanitu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang memuat peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan praktisnya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban ?

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhir, yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari segi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk adanya kepastian hukum;
- 2) Untuk adanya kepastian hak; dan
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas, apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan kongkret yang dihadapi. Keragaman peristiwakongkret yang beragam maka ada beberapa tujuan izin yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya, izin bangunan;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit izin penghuni di daerah padat penduduk;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi organ-organ dengan aktivitas-aktivitas izin berdasarkan “*dark en horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸

6. Format dan Substansi Izin

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam format tertulis. Sebagai tetetapan tertulis, secara umum izin memuat substansi sebagai berikut.¹⁹

a. Kewenangan Lembaga

Dalam izin dinyatakan yang memberikan, biasanya dari kepada surat dan penandatanganan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin. Pada umumnya perbuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai mated dan tugas bersangkutan, dan yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Oleh Karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas lembaga dari lapisan

¹⁸ Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 209

¹⁹ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *op.cit*, hlm. 87

pemerintahan tertentu yang berwenang tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa instansi yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang ialah lembaga pemerintahan instansi yakni wali instansi dengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaanya dicantumkan ketentuan definisi.

b. Pencantuman Alamat

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Izin biasanya dialami orang atau badan hukum.

c. Substansi dalam Dictum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepentingan hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagaimana keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, yang biasa disebut dengan dictum yang merupakan inti dari keputusan. Dictum terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan ini.

d. Persyaratan

Sebagai mana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat (*viirschrifter, bekerkingen*,

en voorwaarden), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam hukum administrasi.

e. Penggunaan Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan perundang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan dalam menilai keputusan terkait. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan.

f. Penambahan Substansi Lainnya

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidak patuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijakannya sekarang atau dikemudian hari.

B. Pemerintahan Daerah (Pemda)

Kedudukan Pemerintahan adalah sebagai inti atau proses dari segala kegiatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa serta semangat UUD NRI 1945, maka pemerintah berkewajiban memplapori pembangunan. Dengan demikian fungsi-fungsi aparatur pemerintahan sebagai mana dikemukakan oleh Prof. Friedman dalam bukunya "*law in a Changing Society*" yaitu :

"(1) *as Protector*, (2) *as Dispenser of Sosial Service*, (3) *as Industrial Manager*, (4) *as Economic Controller*, dan (5) *as Arbitrator*, (masih perlu ditambahkan dengan satu fungsi penting lain yaitu) (6) *as Angent of Development*."

Pemerintah sebagai pelapor pembangunan, haruslah tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional, ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang meratamateril dan spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dalam susunan prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai.²⁰

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga landasan pelaksanaan pembangunan nasional disegala bidang adalah Pancasila dan UUD NRI 1945.

²⁰Djoko Prakoso, 1985, *Proses Prmbuatan Peraturan Daerah*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, hlm. 17

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi UUD NRI 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom (*steek dan locale rechtsgemeenschappe*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom terdapat Badan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena itu, pemerintah pun akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18, dinyatakan sebagai berikut :

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luas, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Perjalanan otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang dalam sejarah penyelenggaraan otonomi daerah, kelihatannya hanya mampu bertahan selama lima tahun akibat adanya perubahan dinamis dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, akibat implikasi dengan adanya amandemen UUD 1945 mulai perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat. Disamping itu juga memerhatikan ketetapan-ketetapan MPR-RI yang harus dijabarkan dalam bentuk undang-undang.

Dalam ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2002, tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI, oleh presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002. Demikian pula

dalam putusan MPR-RI No. 5/MPR/2003 tentang Penugasan Terhadap Pimpinan MPR-RI untuk menyampaikan saran atau Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden. DPR, BPK dan MA dalam sidang tahunan MPR-RI Tahun 2003.²¹

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Sesuai dengan batasan pemerintahannya menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan dengan Pemerintah Daerah adalah “ Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemda dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan Amandemen Bab IV, Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²²

²¹H.Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 4.

²²*Ibid*, hlm. 54

2. Wewenang Pemerintah Daerah Terkait Pemberian Izin

Pada Pasal 18A UUD NRI 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah. Serta hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Demikian juga dengan Pasal 18B UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara berserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang.²³

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan

²³*Ibid*, hlm.1-2

pertimbangan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Salah satu asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ²⁴ adalah asas desentralisasi. Melalui desentralisasi maka pemerintah (pusat) menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Dengan adanya penyerahan tersebut berarti kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu telah beralih dari pemerintah kepada daerah otonomi yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya Pasal 14 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, peraturan ini pada pokoknya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan,

²⁴ Telah diubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Di Indonesia istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan penegakan hukum, namun pada tataran teoritis istilah yang digunakan adalah pelaksanaan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan sebagai salah satu jenis sanksi administratif khususnya dalam rangka penegakan peraturan daerah dalam praktek jarang digunakan. Hal ini umumnya dikaitkan dengan kerugian atau penderitaan yang timbul sebagai akibat diterapkannya paksaan pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah baru akan menerapkan paksaan pemerintah apabila dianggap sangat perlu dan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Dalam hal ini pelaksanaan pemerintah dilakukan jika ada perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan tersebut. Pada umumnya pelaksanaan pemerintahan sebagai jenis sanksi administrasi dikaitkan dengan sistem perizinan.²⁵

3. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda)

Tugas dan wewenang kepala daerah adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan daerah;

²⁵ Hanif Nurcholid, dkk, 2005, *Perencanaan Prosipatif Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Grasindo, hal.3

- c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBD) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mengadili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat merujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah tugas wakil kepala daerah yaitu :

- a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b) Memantu kepala daerah dalam mengorganisasikan kegiatan *instansi vertical* di daerah, menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

- c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten kota;
- e) Memberikan sarana dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala daerah dan dapat menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya. Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rakyat paripurna DPRD.

Gubernur juga karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah daerah, gubernur mempunyai tugas dan wewenang yakni :

- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggara tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota.

4. Pengertian Daerah Otonom

Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta menurut perakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.²⁶ Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat unsure unsure sebagai berikut :

- a. Unsur (elemen) batas wilayah.

Sebagaimana kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam penetapan kebijakan tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat.

- b. Unsur (elemen) pemerintahan.

Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri.

²⁶H. Siswanto Sunarno, *op.cit.* hlm. 6

Elemen pemerintah daerah adalah meliputi pemerintah daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

c. Unsur masyarakat

Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah mempunyai kesatuan masyarakat hukum, bagi *gemeinschaft* maupun *gesellschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintah daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut.

- a. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system NKRI.
- b. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Asas Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaaan yang berupa

pemberian pedoman, seperti dalam penelitin, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersama itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas-fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam pelaksanaan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan asas umum pemerintah , yang menjadi urusan pemerintah daerah meliputi hal berikut :

- a. Bidang Legislasi, yaitu atas prakarsa sendiri membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah yang meliputi Perda Provinsi, kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah meliputi peraturan gubernur, dan/atau peraturan bupati/walikota.
- b. Masalah pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokrasi, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsetrasi dan tugas pembantuan.
- c. Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

C. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah suatu perubahan yang meningkat yang baik ekonomi maupun sosial. Perubahan ekonomi dan sosial ini dapat dicapai dengan cara-cara yang berbeda tergantung dari tujuan dari pembangunan itu sendiri. Tujuan pembangunan biasanya mencakup hal-hal pokok seperti : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah. ²⁷

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditetapkan oleh suatu Negara bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Definisi tersebut secara *implicit* menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan, para politis dengan kekuatan social-politik harus turut berperan. Dunia usaha memainkan peran yang berat terutama dibidang ekonomi. Para teoritis dan candikeiawan ditantang untuk meberikan sumbangsinya, khususnya pada penguasaan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini

²⁷ Kunarjo, 1993, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta, universitas Indoneisa (UI-Perss), hlm. 15

(*opinion leaders*) turut berperan dalam meberdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melakukan pengawasan sosial. Bahkan rakyat jelata pun harus ikut dilibatkan. Singkatnya, pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai penonton, semua harus berperan sebagai pemain.²⁸

Pembangunan sistem hukum perizinan daerah sebagai bagian pembangunan hukum nasional, secara konseptual tidak dapat dilepaskan dengan pengaruh dari teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja. Keterkaitan ini terjadi mengingat pemikiran beliau telah diadopsi dan dikembangkan sebagai landasan filsafat hukum dari pembangunan hukum nasional sejak tahun 1973 sebagaimana dapat disimak dalam GBHN 1973-1983. Bahkan sampai sekarang perkembangan teori Hukum pembangunan yang sah satu konsepnya tentang fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*sosial engineering*) masih relevan dikembangkan dalam pembangunan hukum nasional sebagaimana di atas telah kemukakan oleh Siti Sudari Rangkuti maupun Romli Atmmasasmitta.

Teori hukum pembangunan dan eleborasinya pada awal mulanya (yaitu sekitar tahun 1969) bukanlah dimaksudkan oleh penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari pendapat Roscoe Pound tentang “*law as*

²⁸ Sandang P. Siagian, 2005, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm.6

a tall of sosial engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan “Teori Hukum Pembangunan” atau lebih sering dikenal dengan Midzhab UNPAD. Ada dua hal yang melatar belakangi kemunculan teori hukum itu. Pertama, adanya anggapan bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Ada dua hal yang menjadi inti dari teorihukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

a. Ketertiban atau keteraturan dalam usaha pembaharuan atau pembangunan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak adanya.

b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum.²⁹

Pembangunan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang dimana pun berada. Khususnya di negara-negara berkembang, pembangunan merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan penduduknya. Pembngunan yang merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Namun demikian, setiap

²⁹ I Made Arya Utama, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pustaka Sutra, hlm. 192

pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan di masyarakat baik lingkungan maupun sosial.³⁰

Mungkin kedengaran seperti suatu klise apabila dikatakan bahwa melaksanakan tugas pembangunan yang sangat penting dan hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata. Akan tetapi meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran yang disorot berikut ini ialah selaku stabilisator, selaku investor, selaku modernisator, selaku pelapor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.³¹

2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kemudian energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat, hingga akhirnya energi listrik tersebut sampai ke konsumen. PLTA merupakan sumber listrik bagi masyarakat yang memberikan banyak keuntungan terutama bagi masyarakat pedalaman di seluruh Indonesia. Disaat sumber energi lain mulai menipis

³⁰ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, PT. Gora Aksa Pratama, hlm 23.

³¹ Sondang P. Siagian, *op.cit.* hlm. 142

dan memberikan dampak negatif, maka air menjadi sumber yang sangat penting karena dapat dijadikan sumber energi pembangkit listrik yang murah dan tidak menimbulkan polusi. Selain itu, Indonesia kaya akan sumber daya air sehingga sangat berpotensi untuk memproduksi energi listrik yang bersumber daya air. Saat ini permintaan akan kebutuhan listrik semakin bertambah, hal ini disebabkan oleh :³²

1. Pertambahan jumlah penduduk yang makin tinggi;
2. Perkembangan yang cukup pesat di sektor jasa dan industri;
3. Pembangunan sarana pemerintahan yang semakin meningkat;

Pembangkit tenaga listrik dengan tenaga air diklasifikasikan atas 4 golongan berdasarkan kriteria besarnya kapasitas energi yang dapat dibangkitkan. PLTA dengan kapasitas hingga 99kW diklasifikasikan sebagai Mikro Hidro, yang berkapasitas antara 100kW-999kW diklasifikasikan sebagai PLTA kapasitas rendah, yang berkapasitas antara 1000kW-9999kW diklasifikasikan sebagai PLTA kapasitas sedang, dan yang berkapasitas lebih dari 10.000kW merupakan PLTA kapasitas tinggi. Skala pengembangan masing-masing jenis klasifikasi pembangkitan energi tenaga air didasarkan kepada kepentingan-kepentingan pengembangan wilayah, strategi pembangunan, dan potensi tenaga air yang dimiliki.

Di Indonesia terdapat banyak sekali sungai-sungai besar maupun kecil yang terdapat di berbagai daerah. Hal ini merupakan peluang yang bagus

³²Melanda Kucing,
://www.academia.edu/5308778/TUGAS_PEMBANGKIT_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_AIR, 8/10/2015, 20 : 13

untuk pengembangan energi listrik di daerah khususnya daerah yang belum terjangkau energi listrik. PLTA mulai dikembangkan di Indonesia secara bertahap pada tahun 1900. Masa itu merupakan era dimana penggunaan bahan bakar minyak merupakan sumber energi utama di dunia. Pengembangan PLTA tidak terlalu diprioritaskan oleh karena itu progresnya berjalan lambat. Sedangkan sekarang, pengembangan PLTA mulai di tinjau ulang karena penggunaan bahan bakar minyak menghasilkan banyak polusi lingkungan dan persediaan bahan bakar minyak mulai menipis.

Tenaga air memiliki beberapa keuntungan yang tidak dapat dipisahkan. Bahan bakar untuk PLTU adalah batubara. Berdasarkan pengertian yang sama, kita dapat mengatakan bahwa bahan bakar untuk PLTA adalah air. Nyatanya suatu jurnal teknis mengenai tenaga air menamakannya sebagai batubara putih.

Tetapi keunggulan untuk bahan bakar PLTA ini sama sekali tidak akan habis terpakai ataupun berubah menjadi yang lain. PLTA tidak menghadapi masalah pembuangan limbah. PLTA merupakan suatu sumber energi yang abadi. Air melintas melalui turbin tanpa kehilangan kemampuan pelayanan untuk wilayah di hilirnya. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan PLTA sangat rendah. Pada PLTA, transportasi batubara putih berlangsung secara alamiah. Turbin-turbin pada PLTA bisadioperasikan setiap saat dan cukup sederhana untuk dimengerti.

Peralatan PLTA yang mutakhir, umumnya memiliki peluang yang besar untuk bisa dioperasikan selama 50 tahun. PLTA bisa dimanfaatkan untuk cadangan yang bisa diandalkan pada sistem kelistrikan terpadu. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) bekerja dengan cara merubah energi potensial (dari Dam atau air terjun) menjadi energi mekanik (dengan bantuan turbin air) dan dari energi mekanik menjadi energi listrik (dengan bantuan generator). PLTA dapat beroperasi sesuai dengan perancangan sebelumnya, bila mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) yang potensial sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan dalam pengoperasian PLTA tersebut.

Pada operasi PLTA tersebut, perhitungan keadaan air yang masuk pada waduk/Dam tempat penampungan air, beserta besar air yang tersedia dalam waduk/Dam dan perhitungan besar air yang akan dialirkan melalui pintu saluran air untuk menggerakkan turbin sebagai penggerak sumber listrik tersebut, merupakan suatu keharusan untuk dimiliki, dengan demikian kontrol terhadap air yang masuk maupun yang didistribusikan ke pintu saluran air untuk menggerakkan turbin harus dilakukan dengan baik, sehingga dalam operasi PLTA tersebut, dapat dijadikan sebagai dasar tindakan pengaturan efisiensi penggunaan air maupun pengamanan seluruh sistem, sehingga PLTA tersebut, dapat beroperasi sepanjang tahun, walaupun pada musim kemarau panjang. Kapasitas PLTA diseluruh dunia ada sekitar 675.000 MW ,setara dengan 3,6 Milyar Barrel minyak atau sama dengan 24 persen kebutuhan listrik dunia yang

digunakan oleh lebih satu Milyar orang. Dalam penentuan pemanfaatan suatu potensi sumber tenaga air bagi pembangkitan tenaga listrik ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

- a. Jumlah air yang tersedia, yang merupakan fungsi dari jatuh hujan dan/ atau salju.
- b. Tinggi terjun yang dapat dimanfaatkan, hal mana tergantung dari topografi daerah tersebut.
- c. Jarak lokasi yang dapat dimanfaatkan terhadap adanya pusat-pusat beban atau jaringan transmisi. Komponen-komponen dasar PLTA berupa Dam, turbin, generator dan transmisi. Dam berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selain itu Dam juga berfungsi untuk pengendalian banjir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang yang meliputi Kantor Bupati Kabupaten Enrekang, Kantor Dinas Pekerja Umum Kabupaten Enrekang, Kantor Dinas Pertanian dan Kehutan Kabupaten Enrekang, Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kabupaten Enrekang, karena beberapa instansi diatas merupakan instansi yang berperan penting mengeluarkan data-data sehingga terbitnya surat izin pembangunan Pembangkit Litrik Tenaga Air (PLTA) dan karena lokasi ini juga ditemukan masalah-masalh terkait penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penulisan, adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³³ Dalam penggunaan data primer, pengumpulan data melalui *field Research* terutama dengan menggunakan metode wawancara secara langsung.

³³ Aminuddin, H. Zainal Abidin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , hlm. 30.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian.³⁴ Data dari internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan *observasi* dan *interview*, dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang menjadi materi pembahasan.

- a. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan topik permasalahan di lapangan.
- b. *Interview*, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan dengan informan terkait, yaitu pihak-pihak pada kantor Bupati Kabupaten Enrekang, Kantor Dinas Pekerja Umum Kabupaten Enrekang, Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kabupaten Enrekang,

2. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku

³⁴*Ibid.*

yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Data data yang telah ditelusuri dipilih dan dipilah sesuai dengan kepentingan (ugensi) dari penulisan kripsi.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dari studi lapangan dan keputustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau kenyataan objek yang akan disusun secara logis, selanjutnya, dari pegumpulan data dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas disusun dalam suatu laporan hasil penelitian mengenai tinjauan terhadap izin yang diberikan kepada perusahaan asing oleh pemerintah daerah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) disepanjang daerah aliran sungai di Kabupaten Enrekang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang yang sebagian besar merupakan pegunungan dan dataran tinggi, mengakibatkan Kabupaten ini mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi alternatif, diantaranya adalah aliran sungai, angin, dan energi matahari. Untuk saat ini sudah dikembangkan

Pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan telah ada sejak adanya otonomi daerah, pembangunan kemudian melahirkan usaha-usaha yang diberikan kepada pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan. Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

Urusan pemerintahan kemudian dibagi bersama antara tingkatannya kemudian berdasarkan pembagian urusan itulah pemerintah menjalankan kewenangannya, yang dimaksud urusan pemerintah disini menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

³⁵ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah fungsi-fungsi Pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tindakan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.³⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan pengembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintah daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah tersebut meliputi urusan pendidikan, perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan

³⁶ Pasal 1 ayat (5), Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

kehutanan, sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintah absolute, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.³⁷

Penentuan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Enrekang sesuai dengan izin yang telah tebit mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah meskipun telah diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun Undang-Undang No.32 Tahun 2004 masih digunakan hingga saat ini, hingga ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas aturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang dan untuk meningkatkan iklim usaha yang

³⁷ Pasal 9 ayat (1,2,3,4,5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kondusif dan peyanan prima kepada masyarakat, maka peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTPS) Kabupaten Enrekang dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan, namun dasar dari pelaksanaan dari aturan ini masih menggunakan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki usaha wajib yang menjadi kewenangannya dalam mengatur pemberian izin pembangunan, yaitu :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang dan
- c. Pengendalian lingkungan hidup.

Masih digunakanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dapat terlihat dengan masih digunakanya Undang-undang ini dalam landasar pembentukan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Enrekang.

Konsekuensi dari sistem otonomi daerah, maka pemerintah daerah yang berorientasi dalam membangun daerah yang bersifat otonom. Sebagai daerah otonom titik berat pembangunan di daerah berorientasi

pada membangun kondisi sosial ekonomi serta budaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 mengilhami lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Undang-Undang ini negara atau pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengurus masalah daerahnya sendiri. Hal ini terlihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Daerah mempunyai wewenang untuk mengurus kepentingan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Jika demikian wewenang pemerintah Kabupaten Enrekang sebagaimana didalam izin pembangunan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dengan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan surat persetujuan pembangunan, dimana pembangunan dalam hal ini yaitu investor yang menanamkan modal di daerah dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Enrekang. Hal ini diarahkan dengan fungsi perizinan penanaman modal adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta alat kontrol atas kegiatan usahanya dengan baik terhadap investasi dan sekaligus merupakan aspek legalitas bagi pengusaha guna menyelesaikan kegiatan investasinya. Maka dari itu persetujuan dimana dilihat dari penerbitan surat-surat izin yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga dan dinas.

Dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sepanjang Aliran sungai di Kabupaten Enrekang dari hasil penelian ini terdapat tiga lembaga pemerintahan yang mengeluarkan izin, diantaranya :

1. Kantor Bupati Kabupaten Enrekang
2. Dinas kehutanan
3. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari ketiga lembaga ini adapun izin yang telah terbit yaitu Izin lokasi, kelayakan lingkungan, Izin Tanda Daftar Industri, Izin Gangguan, Izin mendirikan bangunan, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Izin Tempat Usaha.

Merujuk pada Undang-undang No 32 Tahun 2004, perizinan pembangunan di Kabupaten dirasa belum tertata dalam satu wadah atau tempat pengurusannya. Meskipun telah dibentuknya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun dalam hal ini lembaga ini hanya mengeluarkan sebagian dari izin. Melihat banyaknya instansi yang berwenang mengeluarkan izin.

Dengan dihapuskannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Merujuk pada Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemdelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Kontor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Enrekang, maka sejak

30 Juni 2014, kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan diberikan kepada kontor KPTSP, sekaligus dengan keluarnya peraturan ini maka menghapuskan peraturan sebelumnya. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka izn yang menjadi kewenangan dari Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan dinas tidak lagi menjadi kewenangannya, namun telah menjadi kewenagn dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Menilai Lampiran CC angka 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan listrik kontradiktif dengan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenangalistrikan. Undang-undang ketenaga listrikan telah menjamin wewenang pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan ketenagalistrikan. Selama ini Undang-undang ketenaga listrikan, Kabupaten/Kota memeiliki berbagai kewenangan dalam ketenaga listrikan seperti penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota di bidang ketenaga listrikan, penetapan rencana umum ketenaga listrikan, dan sejumlah kewenangan lain. Lampiran CC angka 5 Sub ketenaga listrikan Undang-Undang Pemda, daerah Kabupaten/Kota menjadi kehilangan kesempatan memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah daerah, perumusan lampiran itu bertentangan dengan norma batang tubuh yang tidak sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemerintah (Pemerintah pusat) telah memberikan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam hal tenaga listrikan. Meski pemerintah mengakui bahwa pada tataran implementasi kewenangan tersebut dianggap kurang maksimal karena hingga saat ini masih terdapat daerah-daerah terpencil dalam wilayah kabupaten yang belum tersedia listrik.

Bila dikaitkan dengan otonomi daerah, sejatinya otonomi daerah bukan sekedar gerakan desentralisasi yang membagi-bagi urusan yang ada di pusat untuk dipindahkan ke daerah, melainkan sebagai gerakan yang menjadi bagian dari upaya besar pembaruan menuju tata pemerintahan baru yang lebih baik. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

B. Dasar Hukum Pemberian Izin Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang

Listrik yang saat ini menjadi kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjadi dasar hukum dari izin kewenangan pelaksanaan tenaga listrikan baik pembangunan, pelaksanaan dari ketenagalistrikan, banyaknya perusahaan swasta telah

melakukan usaha di bidang PLTA saat ini. Hal ini didorong terutama karena adanya Permen ESDM (Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral) No. 32 Tahun 2009 di mana tertulis pada pasal 1 bahwa, "PT. PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari energi yang terbaharukan skala kecil sampai menengah hingga 10 MW, dari Badan Usaha Milik (BUMN), milik swasta, koperasi ataupun suadaya masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2009 ditetapkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Hal ini untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, perlu mengatur kembali Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Menteri Perindustrian Nomor. 48/M-IND/PER/4/2010.

Dengan adanya aturan yang menjadi landasan pentingnya pengembangan PLTA baik di provinsi maupun di daerah yang akan memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah pada khususnya. Dalam hal ini penulis mengkaji masalah dasar hukum yang menjadi landasan pemberian izin Pemerintah Daerah kabupaten Enrekang Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Dasar hukum kewenangan pemerintah daerah terhadap pemberian izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air yaitu diatur dalam Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas aturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang dan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pelayanan prima kepada masyarakat, maka peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTPS) Kabupaten Enrekang dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan.

Adapun dasar Hukum yang digunakan dari pemberian izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air ini yaitu :

1. Izin Lokasi :

- a. Surat Direktur Utama PT.X Nomor 004/DIR/PLTM/ENR-SIE/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Lokasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Belajen selasa 147.000M2
- b. Surat Nomor : 071.1/0229/SETDA perihal Izin Peinsip Pembangunan PLTM di Belajen Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

- c. Kelengkapan Dokumen Persyaratan UKL/UPL dan Amdal
2. Izin Tanda Daftar Industri
- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI);
 - b. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan terpadu satu pintu (KPTSP) Kabupaten Enrekang.
3. Izin Gangguan :
- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - b. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 03 Tahun 2010 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Enrekang.
4. Izin Mendirikan Bangunan
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.
 - b. Keputusan Bupati Enrekang Nomor 03 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian Kewenanagan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu(KPTSP) Kabupaten Enrekang.

5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

- a. Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Surat Izin Usaha Pedagagan dan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Enrekang.

6. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas

- a. Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Daftar Perusahaan.
- b. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Enrekang.

7. Izin Tempat Usaha

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 27 Tahun 2001 Tanggal 24 Desember 2001 tentang Retribusi Pemberian Surat Izin Penempatan Usaha.
- b. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Enrekang.

Pembentukan kewenangan pemerintah Daerah dalam pemberian izin pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Enrekang, masih menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meski Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 namun aturan ini tidak berlaku surut untuk Izin yang telah terbit sejak Tahun 2010 hingga 2014 (ditetapkannya Undang-undang baru). Adapun yang dijelaskan di dalam Undang-Undang ini bahwa Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib yang menjadi kewenangan dalam mengatur pemberian izin, yaitu :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang dan;
- c. Pengendalian lingkungan hidup.

Adapun hasil yang telah dihimpun dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Enrekang, syarat yang harus dipenuhi adalah pihak dari perusahaan yang akan mendirikan industri mendatangi KPTSP dan memasukkan berkas yang terdiri surat permohonan, foto copy KTP pemilik/direktur umum/penanggung jawab perusahaan, foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya (bagi pemohon yang berbentuk badan usaha), copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan, copy surat izin Gangguan (HO)/surat Izin tempat Usaha (SITU), copy persetujuan kelayakan dan izin lingkungan, copy surat keterangan instansi teknis (jika

dipersyaratkan), pas foto berukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar di loker penerimaan berkas dan penyerahan izin yang di verifikasi secara administrasi.

Mekanisme permohonan izin PLTA yang berlaku di Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

8. Permohonan izin prinsip :

Mengajukan permohonan dengan blangko yang telah disediakan dibubuhi materai Rp.6000,- dengan dilampiri :

- a. Copy KTP/Akta Pendirian Badan Usaha
- b. Gambar denah lokasi dan *Site Plan*;
- c. Proposal/rencana usaha yang akan dimohonkan

9. Peninjauan lokasi dan rekomendasi dari team terpadu

Peninjauan lokasi dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan dan juga sebagai bahan rekomendasi untuk menerbitkan izin.

10. Penyusunan FS DE PLTA oleh pemohon

11. Pengusulan izin-izin teknis:

- a. Izin pemakaian air
- b. Izin lokasi
- c. Izin mendirikan bangunan

12. Pengurusan kerjasama antara Pemohon dengan PT PLN;

13. Proses pembangunan fisik PLTA oleh pemohon;

14. Permohonan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) atau izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS)

15. Uji laik operasi dan lingkungan oleh Lembaga yang berwenang;

16. Operasional.

sebagai bahan pertimbangan saat mengajukan izin usaha ketenagalistrikan pemohon harus melimpirkan beberapa persyaratan sesuai dengan izin yang akan diajukan, yaitu :

a. IUKU SEMENTARA

1. Persyaratan administrasi

- a. Identitas pemohon
- b. Akta pendirian perusahaan
- c. Profil perusahaan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Persyaratan teknis :

- a. Studi kelayakan awal
- b. Kapasitas pembangkit
- c. Jadwal pembangunan
- d. Surat penunjukan pemenang lelang penunjukan langsung dari PKIK dan PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan.

IUKU sementara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat dicabut apabila dalam waktu satu tahun melakukan kegiatan.

b. IUKU

1. Persyaratan administratif

- a. Identitas pemohon
- b. Akta pendirian perusahaan
- c. Profil perusahaan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Kemampuan pendanaan

2. Persyaratan teknis :

- a. Studi kelayakan
- b. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
- c. Diagram satuan garis (*single line diagram*)
- d. Jenis dan kepastian usaha
- e. Keterangan gambar dari usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik
- f. jadwal pembangunan dan rencana pengoprasian
- g. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan
- h. Izin dan persyaratan lainnya (AMDAL atau UKL dan UPL, IMB, PMA).

Pemohonan IUKU atau IUKU sementara yang ditolak akan diberikan secara teknis paling lambat 30 hari setelah permohonan.

c. IUKS

1. Persyaratan administratif :

- a. Identitas pemohon
- b. Akta pendirian perusahaan
- c. Profil perusahaan
- d. Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP)

2. Persyaratan teknis :

- a. Lokasi instalasi termaksud tata letak (gambar situasi)
- b. Deigram satuan garis (*single line* digaram)
- c. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik
- d. Jadwal pembangunan³⁸

Pemenuhan kelengkapan berkas untuk syarat mendapatkan izin industri harus mendapatkan persetujuan ataupun surat rekomendasi dari dinas-dinas setempat, juga terdapat beberapa izin yang dikeluarkan dari beberapa dinas ataupun instansi, seperti misalnya izin kelayakan dan lingkungan dimana berasal dari kantor lingkunagn hidup daerah,izin lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MiniHidro, dan lain sebagainya.

Pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sepanjang Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang ini dan aturan secara

³⁸ Wawancara dengan Bapak Num Rawan (Kepala Kantor Penanaman Moodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang).

khusus belum diatur didalam peraturan daerah, namun untuk kewenangan pemberian izin, telah dipaparkan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dan pembahasannya baik dari teori-teori maupun data-data, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, meskipun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini telah diubah dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 namun, dalam hal ini izin yang telah terbit tidak berlaku surut. Kewenangan izin yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang yaitu itu izin lokasi, kelayakan lingkungan, Izin Tanda Daftar Industri, Izin Gangguan, Izin mendirikan bangunan, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Izin Tempat Usaha. Sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang. kepada kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang berwenang mengeluarkan beberapa izin seperti izin Izin Tanda Daftar Industri, Izin Gangguan, Izin mendirikan bangunan, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Izin Tempat Usaha. Adapun izin yang lain merupakan kewenangan dari dinas atau instansi lain.

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 5 merupakan dasar pemberian izin kewenangan dari pelaksanaan ketenagalistrikan baik pembangunan, pelaksanaan dari ketenagalistrikan, serta Merujuk pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2009 ditetapkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Hal ini untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, perlu mengatur kembali Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Menteri Perindustrian Nomor. 48/M-IND/PER/4/2010. Serta peraturan daerah yang menjadi dasar dari dikeluarkannya izin baik itu izin dan Peraturan Bupati. Melihat izin yang telah terbit masih banyak kekurangan

administrasi yang terdapat misalnya adanya izin yang keluarnya izin tidak sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, serta belum adanya turan hukum yang mengikat secara jelas untuk peraturan daerah.

B. Saran

Dari rumusan yang sudah penulis uraikan dari jelaskan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai beriku :

1. Dengan adanya pembagian kewenangan antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Dinas baik itu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi, Kantor Bupati Enrekang dan instansi-instansi lain yang memiliki andil dalam pembembentukan penerbitan izin, maka secara langsung instansi-instansi diluar dari KPTSP tidak maksimal perannya dalam Pemerintahan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pembagian kewenangan yang lebih seimbang dan teratur antara setiap instansi agar izin yang akan keluar menjadi lebih terarah.
2. Dibutuhkan peraturan daerah yang baru yang khusus mengatur masalah tenaga listrikan karena hingga sampai saat ini masih menggunakan Undang-Undang tenaga listrikan dan peraturan menteri. Juga dibutuhkannya peraturan dasar hukum dari peraturan daerah yang masih menggunakan Undang-undang tentang Pemerintahan daerah yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aminuddin, H. Zainal Abidin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bryan A. Garner (ed), 1999, *Blac's Law Dictionary*, USA, Seventh Edition, PT. PAUL, MINN.
- Djoko Prakoso, 1985, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.
- Haryatmoko, 2007, *Etika Komunikasi*, Yogyakarta, Kanisius (Anggota IKAPI)
- Hanif Nurcholid, dkk, 2005, *Perencanaan Prsitipatif Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- H.Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kunarjo, 1993, Kunarjo, 1993, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta, universitas Indoneisa (UI-Perss).
- Made Arya Utama, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pustaka Sutra.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Malang, Sentara Perss.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, PT. Glora Aksa Pratama.
- Philipus M. hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridiko.
- Pusat Bahasa Sepdikbud, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Prajudi Admosuditdji, 1981, *Hukum Amnistrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sandang P. Siagian, 2005, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

Samuelson, 2003, *Ilmu Mikro Ekonomi*, Jakarta, Media global Edukasi.

Sri Prudyatmoko, 2009, *Perizinan Program dan Upaya Pembangunan*, Jakarta, Grasindo.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Perubahan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Undang-Undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

INTERNET :

[www.academia.edu/5308778/TUGAS_PEMBANGKIT_PEMBANGKIT_LIS
TRIK_TENAGA_AIR](http://www.academia.edu/5308778/TUGAS_PEMBANGKIT_PEMBANGKIT_LIS_TRIK_TENAGA_AIR), 8/10/2015, 20 : 13

www.aparaturnegara.go.id. Diakses pada 3 oktober 2015, 2/10/2015,
15:40

[https://adienergy.wordpress.com/2015/06/07/saat-terbaik-investasi-
di-pembangkit-listrik-tenaga-minihidro-pltm/](https://adienergy.wordpress.com/2015/06/07/saat-terbaik-investasi-di-pembangkit-listrik-tenaga-minihidro-pltm/) , 3/10/2015, pukul 14:30.

Situs Berita dan Informasi Lingkungan,
[http://www.mongabay.co.id/2013/02/27/29-kasus-pelanggaran-izin-oleh-
26-pebisnis-tambang-dilaporkan-bpk-ke-bareskrim-polri/](http://www.mongabay.co.id/2013/02/27/29-kasus-pelanggaran-izin-oleh-26-pebisnis-tambang-dilaporkan-bpk-ke-bareskrim-polri/), diakses pada
22/10/2015, pukul 09.00.